



Aset Masih jadi Soal

PONTIANAK - Kendati mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), persoalan aset Pemerintah Provinsi Kalbar belum sepenuhnya selesai. Salah satunya aset sitaan dari eks Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Ketika PKI dibubarkan, asetnya disita negara," ujar Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya di ruang kerjanya, Selasa (9/7).

Menurut Christiandy, setelah dilakukan penyitaan terhadap aset-aset eks PKI, prosesnya tidak jelas. Sertifikatnya juga belum menjadi nama Pemerintah Provinsi Kalbar. Tak hanya aset eks PKI, ada juga aset yayasan yang tidak terkait PKI, tetapi juga disita negara karena kondisi politik ketika itu. "Ini juga menjadi masalah," kata Christiandy.

Contoh aset lain yang bermasalah adalah Sekolah Dasar Inpres. Ketika sekolah tersebut berdiri, pemerintah tidak memikirkan sertifikat hak milik. Hal ini disebabkan ketika itu pendidikan memerlukan banyak gedung. Pemerintah pun membangun banyak gedung SD Inpres. Akhirnya saat ini gedung-gedung tersebut menimbulkan persoalan.

"Ada juga masalah aset jalan di Dinas Pekerjaan Umum. Jalan sudah dibangun dari dulu tetapi tidak tercatat," ujar Christiandy.

Menurut Christiandy, aset ini diselesaikan secara bertahap. Gambaran untuk proses penyelesaiannya juga sudah ada, termasuk aset-aset yang sulit dan prosesnya memakan waktu bertahun-tahun. "Prosesnya hampir selesai. Ada upaya untuk menyelesaikannya. Setidaknya itu dinilai Badan Pemeriksa Keuangan dan kita sudah dalam jalur undang-undang," ungkap Christiandy. Christiandy menuturkan saat ini jumlah aset yang diaudit mencapai Rp2,5 triliun. "Diperkirakan jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya," katanya.

◆ Ke Halaman 15 kolom 5



Aset Masih jadi Soal

Sambungan dari halaman 16

Christiandy mengungkapkan BPK sangat teliti dan tidak ada toleransi dalam melakukan pemeriksaan. Instansi tersebut memiliki metode. Misalnya berkaitan dengan aset, mereka memiliki aturan yang harus digunakan dan menjadi patokan dalam pekerjaannya.

"Kami mendapatkan WTP tidak mendadak, melainkan harus bekerja satu periode (5 tahun). Ketika masuk disclaimer. Dua tahun mendapat wajar dengan pengecualian. Banyak yang harus kami selesaikan itu masalah dibawah tahun 2007," ungkapnya.

Ia menambahkan kedepannya opini WTP ini akan terus dipertahankan. Pemerintah

Provinsi Kalbar juga mendorong kabupaten dan kota dalam pengelolaan keuangannya agar juga bisa meningkatkan opini hasil pemeriksaan BPK. "Kami berupaya rekomendasi itu harus dalam 60 hari diselesaikan. Uang itu tidak ada yang diselewengkan. Bukti penggunaannya jelas, tetapi pencatatannya yang tidak sesuai aturan," jelas Christiandy. **(uni)**